

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep/Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mengandung arti keefektifan (effectiveness), pengaruh/efek keberhasilan, atau kemajuran/kemujaraban.¹² Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk aparat penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.¹³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁴

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena

¹² Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Hal. 85.

¹³ Soerjono Soekanto. 1985. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sannksi*. Remaja Karya Bandung. Hal. 7.

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 110.

hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilanun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai instrinsik subyektif dari masing-masing orang.

- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun

hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaanpun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Faktor yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga hukum tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.¹⁵

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku sebuah efektifnya hukum apabila didukung oleh 3 (tiga) pilar, yaitu:¹⁶

- 1) Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan
- 2) Peraturan hukum yang jelas dan sistematis
- 3) Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

B. Kepatuhan Hukum

Secara terminologi kata kepatuhan berasal dari kata “patuh”, dalam kamus bahasa Indonesia memiliki makna suka menurut perintah atau taat kepada perintah.¹⁷ Secara umum pengertian kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum positif yang tertulis.

¹⁵ *Ibid.* Hal. 112.

¹⁶ Raida L Tobing, dkk. 2011). “ *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM RI*”. Hasil Penelitian Hukum, Jakarta

¹⁷ Tri Rama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mitra Pelajar, Surabaya, Hal. 366

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum terhadap hukum positif tertulis, ditentukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:¹⁸

1) Pengetahuan tentang peraturan

Pengetahuan tentang peraturan adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh hukum.¹⁹

2) Pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu atau suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.²⁰

3) Sikap hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.²¹

4) Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah sesuatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Pada umumnya kepatuhan hukum dikaitkan dengan kesadaran hukum.

Wijaya mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan keadaan dimana

¹⁸ Musalam Abdurrahman, 2006, *Ketidakpatuhan TKI*, UMM press, Malang, Hal. 49.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* Hal. 50.

²¹ *Ibid.* Hal. 51

tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat, masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai paksaan, walupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.²²

Disamping itu Paul Scholten menjelaskan bahwa kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum antara seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.²³

C. Konsep Mengenai Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan definisi lalu lintas menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 ialah “sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”, artinya adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Lalu lintas dan angkutan jalan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai

²² Widjaya. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*. Jakarta. Era Swasta. Hal. 14.

²³ Martokusumo. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. Hal. 57.

bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, diselenggarakan dengan tujuan:

- 1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:²⁴

²⁴ Maghdalena Todingrara. 2013. *“Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian”*. Hasil Penelitian Hukum, Makassar.

- 1) Perjalanan bolak-balik
- 2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- 3) Perhubungan antara sebuah tempat

2. Pengertian Lalu Lintas

Pelanggaran Lalu Lintas Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian lalu lintas hal ini juga berkaitan dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Ketidakpatuhan saat berlalu lintas merupakan perbuatan yang dapat melanggar peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat jadi tidak usah menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.²⁵

Yang dimaksud dengan pelanggaran diatas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a) Berprilaku tertib; dan/atau
- b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan raya, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Sedangkan pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang biasanya melanggar pasal 106 ayat (5) dimana saat diadakan pemeriksaan

²⁵Nanda Nandika Pamungkas. 2014. *"Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Penyitaan SIM Akibat Pelanggaran Dan Tindak Pidana Berlalu Lintas"*. Hasil Penelitian Hukum, Jombang

kendaraan bermotor wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

3. Syarat Mengemudikan kendaraan bermotor

Syarat mengemudikan kendaraan bermotor dirumuskan dalam pasal pasal 77 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan
2. Surat Ijin Mengemudi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas dua jenis :
 - a) Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor perseorangan; dan
 - b) Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor umum.
 - c) Untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
 - d) Untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.
 - e) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi untuk kendaraan bermotor perorangan

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan harus mengutamakan ketertiban dan keselamatan berdasarkan pasal 106 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh dengan konsentrasi .
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknik dan laik jalan.
- 4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan
 - a) Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b) Marka jalan;
 - c) Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d) Gerakan lalu lintas;
 - e) Berhenti dan parkir;
 - f) Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- 5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

- a) Surat Tanda Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor;
 - b) Surat Izin Mengemudi;
 - c) Bukti Lulus Uji Berkala; dan/atau
 - d) Tanda bukti lain yang sah.
- 6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor empat atau lebih di jalanan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- 7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- 8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

D. Ketentuan Surat Ijin Mengemudi (SIM)

1. Pengertian Surat Ijin Mengemudi (SIM)

SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.²⁶

²⁶ Polri, *Surat Ijin Mengemudi (SIM)*, <https://www.polri.go.id/layanan-sim.php>, Diakses 05 Oktober 2017

Surat Ijin Mengemudi memiliki beberapa Fungsi sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 86 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Sebagai Bukti Kompetensi

Kompetensi mengemudi merupakan kemampuan seseorang pengemudi dalam bidang pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan benar sesuai pernyataan yang ditentukan berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (Subdit Dikmas Ditlantas Polri, 2009:24).

2) Sebagai Registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Memuat Keterangan Lengkap Identitas Pengemudi

Berguna sebagai tanda pengenal yang berisi mengenai identitas pengemudi serta berkaitan dengan kewenangan Kepolisian daerah tertentu yang telah mengeluarkan Surat Ijin Mengemudi (SIM)

3) Guna Mendukung Kegiatan Penyelidikan, Penyidikan, dan Identifikasi Forensik Kepolisian.

Penyelidikan menurut pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Penyidikan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah “serangkaian

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”.

Identifikasi forensik kepolisian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menentukan identitas mayat seseorang yang berguna sebagai dasar untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan untuk menangkap sebuah peristiwa.²⁷

2. Prosedur Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)

a) Prosedur Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi telah dirumuskan terkait dengan prosedur pembuatan Surat Izin Mengemudi. Untuk prosedur Surat Izin Mengemudi sesuai dengan pasal 81 yang mengatakan bahwa :

- 1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- 2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :
 - a) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A,

Surat Izin Mengemudi C, Surat Izin Mengemudi D;

²⁷ Uce Adi Wibowo. 2013. *“Efektifitas Usia 17 Tahun Sebagai Syarat Memperoleh Surat Ijin Mengemudi Golongan C (SIM C) Guna Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Surakarta”*. Hasil Penelitian Hukum, Surakarta

- b) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II
- 3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a) Identitas diri berupa kartu tanda penduduk
 - b) Pengisian formulir permohonan; dan
 - c) Rumusan sidik jari.
- 4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter, yakni meliputi:
 - 1) Kesehatan penglihatan, diukur dari kemampuan kedua mata berfungsi dengan baik;
 - 2) Kesehatan pendengaran, diukur dari kemampuan mendengar dengan jelas bisikan dengan satu telinga tertutup;
 - 3) Kesehatan fisik atau perawakan, diukur dari tekanan darah harus dalam batas normal dan tidak ditentukan keganjilan fisik;
 - 4) Dalam hal peserta uji mempunyai cacat fisik, pengukuran kesehatan fisik, menilai juga bahwa kecacatannya tidak menghalangi peserta uji untuk mengemudi kendaraan bermotor (ranmor) khusus;
 - b) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologi.
 - 1) Kemampuan konsentrasi, diukur dari kemampuan memusatkan perhatian atau memfokuskan diri pada saat mengemudikan kendaraan bermotor (ranmor) di jalan;

- 2) Kecermatan, diukur dari kemampuan untuk melihat situasi dan keadaan secara cermat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mempersiapkan kondisi yang ada;
 - 3) Pengendalian diri, diukur dari kemampuan mengendalikan sikapnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor (ranmor);
 - 4) Kemampuan penyesuaian diri, diukur dari kemampuan individu mengendalikan dorongan dari dalam diri sendiri sehingga bisa berhubungan secara harmonis dengan lingkungan, dan beradaptasi dengan baik dengan situasi dan kondisi apapun yang terjadi di jalan saat mengemudi;
 - 5) Stabilitas emosi, diukur dari keadaan prasaan seseorang dalam menghadapi rangsangan dari luar dirinya dan kemampuan mengontrol emosinya pada saat menghadapi situasi yang tidak nyaman selama mengemudi;
 - 6) Ketahanan kerja, diukur dari kemampuan individu untuk bekerja secara teratur dalam situasi yang menekan.
- 5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) Ujian teori;
 - b) Ujian praktik; dan/atau
 - c) Ujian keterampilan melalui simulator
- 6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap pengemudi kendaraan bermotor yang akan mengajukan permohonan:

- a) Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
- b) Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

b) Persyaratan Mengemudi Kendaraan Bermotor

Untuk memiliki Surat Ijin Mengemudi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh pengendara sepeda motor atau pengendara mobil. Beberapa persyaratan tersebut telah diatur dalam pasal 77 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan
- 2) Surat Ijin Mengemudi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas dua jenis :
 - a) Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor perseorangan; dan
 - b) Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor umum.
- 3) Untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- 4) Untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.

- 5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi untuk kendaraan bermotor perorangan

c) Pendidikan Dan Pelatihan Pengemudi

Pendidikan dan pelatihan mengemudi dirumuskan dalam pasal 78 dan pasal 79 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 78 mengatakan bahwa :

- 1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapatkan izin dan terereditasi dari pemerintah.
- 2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur , dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diperkuat kembali dalam pasal 79 yang mengatakan bahwa :

- 1) Setiap calon pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.

- 2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calon pengemudi belajar atau menjalani.

3. Bentuk Dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi

Bentuk dan penggolongan surat izin mengemudi dibagi menjadi dua, yaitu surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan dan surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor umum.

- a. Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi :

- 1) SIM A

Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan kendaraan mobil penumpang dan barang perorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.

- 2) SIM B I

Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan kendaraan mobil penumpang dan barang perorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg

- 3) SIM B II

Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan menarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk keretan tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.

4) SIM C

Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor

5) SIM D

Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

b. Surat Ijin Mengemudi untuk kendaraan bermotor umum

Surat Ijin Mengemudi untuk kendaraan bermotor umum diatur dalam pasal 82 sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) huruf b digolongkan menjadi :

1) SIM A Umum

SIM A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor Umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.

2) SIM B I Umum

Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan mobil penumpang dan barang Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.

3) SIM B II Umum

Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan menarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan Umum dengan berat yang diperbolehkan untuk keretran tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.

4. Sanksi Surat Izin Mengemudi

Berbicara tentang sanksi SIM maka sanksi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yakni sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Mengenai sanksi Surat Izin Mengemudi (SIM) yakni sanksi pidana dan sanksi administrasi diantaranya adalah kurungan dan denda serta hingga pencabutan izin. Pada pasal 77 ayat (1) yakni setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Karena ada sanksi yakni :

- 1) Pada pasal 281 menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Pasal 288 ayat (2) bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Mengenai pemberian tilang kepada seseorang apabila seseorang tersebut melakukan pelanggaran atas Surat Izin Mengemudi yakni pada pasal 106 ayat (5) dimana pada saat diadakan pemeriksaan di jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan Surat

Tanda Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Surat Izin Mengemudi, dan Bukti Lulus Uji Berkala.

Serta dirumuskan pula kewenangan pihak kepolisian dalam memberikan data pelanggaran seperti yang dijelaskan dalam pasal 89 ayat (1) dan (2) yang mengatakan :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap Surat Izin Mengemudi milik pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana Lalu Lintas
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus oleh pengadilan.

E. Konsep Tentang Pelajar

Pelajar adalah peserta didik. Peserta didik menurut pasal ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan tertentu.

Jalur pendidikan menurut pasal 1 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional ialah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan menurut pasal 13 (1) Undang-undang Republik Indonesia tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional terdiri atas pendidikan

formal, pendidikan non formal, pendidikan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Jenjang pendidikan menurut pasal 1 (8) Undang-undang Republik Indonesia tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan menurut pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Uraian pendidikan dasar diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional, ialah :

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Selanjutnya untuk pendidikan menengah diatur dalam pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Republik Indonesia tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional, yaitu:

1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

3. Pendidikan menengah terbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Jenis pendidikan menurut pasal 1 ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional ialah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan menurut pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Seperti yang telah dipaparkan Sekolah Menengah Atas adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat. Sekolah menengah atas (SMA) sederajat ditempuh dalam waktu tiga tahun, mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Pelajar SMA umumnya berusia 16-19 tahun ke atas. Usia pelajar SMA tersebut merupakan pelajar SMA sederajat sudah menginjak masa dewasa dan dapat dikatakan telah dewasa.

Untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor, pengendara diwajibkan untuk memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. Syarat utama kewajiban untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) akan diwujudkan apabila seseorang telah berusia 17 tahun, sesuai dengan pasal 81 ayat (2) undang-undang no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Usia 17 tahun dianggap sebagai usia peralihan meninggalkan sifat

anak-anak dan mulai menjadi dewasa. Selain itu diusia 17 tahun dianggap dewasa karena sudah bisa mengontrol emosinya yang diajarkan lewat kurikulum empati dan kognitif.²⁸

Dewasa menurut psikologi dilihat dari sisi biologisnya anak memasuki usia 17 tahun sudah mulai berkembang dengan baik, Kalau otaknya sudah mencapai kematangan, maka seseorang dirasakan cukup mampu dan terampil untuk melakukan analisa secara visual dan prediksi terhadap situasi di jalan raya, termasuk yang kaitannya dengan jarak kendaraan. Selain itu apabila nekat mengemudikan kendaraan sebelum umur 17 tahun, dapat berpotensi besar untuk terlibat kecelakaan di jalan raya, yang akan berakibat dengan cacat atau bahkan dengan kematian. Bukan hanya dibutuhkan keterampilan dalam berkendara saja, paling penting adalah soal kemampuan otak, dan bagaimana seseorang mengontrol emosinya, hal tersebut dapat berpengaruh pada gaya mengemudinya yang membuat seseorang mengemudi secara agresif.²⁹

Kemudian pengertian dewasa menurut hukum terdapat perbedaan dalam penentuan umur seseorang dapat dikatakan dewasa. Seseorang telah dianggap dewasa apabila cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum yang mengatasnamakan dirinya sendiri maupun mewakili pihak lain. Cakap bertindak dalam hukum (cakap hukum) atau disebut *Handelingsbekwaam* adalah orang yang sudah dewasa dan orang yang tidak ditaruh di bawah pengampuan.³⁰

²⁸ Arif Arianto. *Boleh Menyetir Usia 17 Tahun*. <https://oto.detik.com>. Diakses 17 Februari 2018.

²⁹ Niko Fiandri, *Batas Usia Memiliki SIM*, <https://www.gridoto.com>, Diakses 17 Februari 2018

³⁰ Komariah. 2013. *Hukum Perdata*. UMM Press. Hal. 19.

Batas usia ini adalah usia seseorang mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, sehingga seseorang dapat melakukan kewajiban-kewajiban tertentu tidak bergantung pada orang tua, seperti hak memilih, kewajiban bertanggung jawab secara hukum. Dalam konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan “apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan”. Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur pertanggung jawaban pidana. Tidakkah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian tentang hal ini namun dalam literatur hukum pidana ditemui beberapa pendapat tentang hal ini. Simons mengatakan “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila :³¹

- 1) Ia mampu untuk mematuhi atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- 2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

³¹ Yuhar Widyanto. 2012. “*Tanggung Jawab Pidana PT. Lapindo Brantas Dalam Kasus Banjir Lumpur Di Sidoarjo*”. Hasil Penelitian Hukum, Sidoarjo